

KEBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI (Ditinjau dari Aspek Modal Sosial dan Peran Lembaga Adat)

NI NYOMAN YULIARMI, A.A.I.N MARHAENI, I. A. N. SASKARA,

SUDARSANA ARKA, NI L. P. WIAGUSTINI

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
nyuli@yahoo.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) pengaruh modal sosial terhadap tingkat keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali; 2) pengaruh modal sosial terhadap peran lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya dan keuangan untuk keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali; dan 3) pengaruh lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, dan keuangan terhadap keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali.

Berdasarkan pertimbangan tertentu penelitian 5 kabupatendengan jumlah keluarga miskin (Sejahtera satu) (BKKBN 2012), yang paling banyak memiliki unit industri kerajinan rumah tangga yaitu: Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, Tabanan, dan Gianyar. Jumlah unit sampel diambil sebanyak 100. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil analisis disimpulkan: 1) Modal sosial belum dapat secara langsung mempengaruhi keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali, 2) Modal sosial dapat mempengaruhi peran sosial, budaya, dan keuangan dari lembaga adat untuk meningkatkan keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali, 3) Peran sosial, budaya, dan keuangan dari lembaga adat dapat mempengaruhi keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali.

Kata kunci: Lembaga Adat, Modal Sosial, Keberdayaan, Kemiskinan.

EMPOWERMENT OF HOUSEHOLD CRAFT INDUSTRY FOR POVERTY ERADICATION IN BALI PROVINCE (Assessment from social capital aspect and the role of traditional institution)

The aim of this research is to analyze 1) the impact of social capital on empowerment level of household craft industry in Bali Province, 2) the impact of social capital on traditional institution from its social, culture, and financial role for empowering household craft industry in Bali Province, and 3) the impact of traditional institution from its social, culture, and financial role on empowerment of household craft industry in Bali Province.

Based on certain reason, this study was carried out in 5 regencies with poor family level I who has the biggest number of household craft industry unit, i.e., Badung, Karangasem, Bangli, Kelungkung, Tabanan, and Gianyar. The number of sample was 100. Data were collected through interview by using questionnaire. Technique of analysis was Equation Structural Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS).

Based on result and discussion, it is concluded that 1) social capital was not influenced directly the empowerment of household craft industry in Bali Province, 2) social capital influence social, culture, and financial role of traditional institution in endeavour to increase empowerment of household craft industry in Bali Province, and 3) social, culture, and financial role of traditional institution influence empowerment of household craft industry in Bali Province.

Keywords: traditional institution, social capital, empowerment, poverty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program pengentasan kemiskinan dewasa ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui peran instansi terkait, namun jumlah masyarakat miskin belum dapat dihapuskan seratus persen. Hal ini ditunjukkan dari data bahwa jumlah masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tetap ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upaya-upaya peningkatan peran masyarakat yang kurang mampu ke depan dapat lebih difokuskan ke arah pengembangan aset ekonomi produktif bagi kaum miskin. Peningkatan pengembangan aset ekonomi produktif dapat dilakukan dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha kerajinan dengan semangat kewirausahaan tinggi. Bantuan tersebut dapat diupayakan dengan memberi bantuan dalam bentuk modal fisik, modal manusia, dan pelatihan, maupun modal sosial untuk menghasilkan barang kerajinan.

Hasil produksi industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing. Ini terbukti dari perkembangan produktivitas rata-rata selama lima tahun sangat berfluktuasi dan cenderung menurun. Data 2003-2007 menunjukkan perkembangan produktivitas yang menurun, dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 2,03 persen per tahun. Walaupun periode tiga tahun berikutnya 2008-2010 berangsur-angsur telah terjadi peningkatan produktivitas rata-rata sebesar 21,98 persen per tahun (Disperindag Provinsi Bali, 2010), namun belum bisa disimpulkan telah terjadi peningkatan kemandirian industri kerajinan di Provinsi Bali (Yuliarmi, 2011).

Di samping pentingnya meningkatkan peranan modal ekonomi/keuangan dan modal manusia sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produktivitas usaha kerajinan yang dihasilkan, maka keberadaan modal sosial tidak kalah penting untuk diperhatikan. Ketersediaan sumber daya keuangan baik melalui perbankan milik pemerintah, swasta, maupun lembaga adat sesungguhnya banyak dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri kecil rumah tangga di Provinsi Bali. Namun, akses terhadap permodalan yang tersedia sangat sulit, oleh karena ketidakberdayaan dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Lemahnya keberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses sumberdaya keuangan untuk meningkatkan usaha juga ditemukan pada penelitian Cristiawan dan Hidup (2010). Dalam pemenuhan permodalan dari aktivitas usaha yang dilakukan khususnya dalam upaya mendapatkan kredit usaha kecil bagi rumah tangga miskin, masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kelemahan mereka untuk meningkatkan keberdayaan usaha yang dilakukan. Dengan melihat kelemahan pelaku usaha kecil bagi rumah tangga miskin ini, diperlukan peran lebih riil dari

pemerintah melalui institusi terkait yang dapat dilakukan dengan memberikan kredit tanpa agunan agar dapat meningkatkan keberdayaan usaha tersebut.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai *local genius* milik desa *pakraman* memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan fungsi sosialnya. Peningkatan fungsi sosial ini tidak saja dapat menguatkan tujuan LPD, yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kebersamaan para anggota terhadap LPD dan antar anggota (Murjana Yasa, 2009). Dengan kebersamaan yang dibangun diantara anggota masyarakat yang tergabung sebagai anggota LPD, maka akan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya, dan keberdayaan industri kerajinan rumah tangga pada khususnya yang berada pada lingkungan desa adat tersebut.

Perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, salah satunya adalah dengan penguatan peran kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan serta pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan pembangunan. Meningkatnya peran dan hubungan antar satu kelompok dengan lainnya di lingkungan desa adat berdasarkan atas jalinan saling percaya dapat menciptakan munculnya modal sosial.

Modal sosial, di samping modal ekonomi/keuangan dan modal manusia, juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Norma melalui tradisi sejarah yang terbangun dari tata cara dan perilaku seseorang atau suatu kelompok masyarakat, akan memunculkan modal sosial yang kuat dan dapat mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok. Norma-norma ini secara informal dapat mengatur hubungan satu individu dengan individu lainnya atau kelompok, sehingga menimbulkan kepercayaan diantara sesamanya. Secara kriteria ekonomis, atas dasar kepercayaan ini, maka suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara produktif, efisien dan ekonomis. Coleman (1998) menyebutkan bahwa modal sosial sebagai faktor produksi memainkan peran yang sangat penting, oleh karena keberadaannya mampu meningkatkan produktivitas usaha dan efisiensi.

Kemiskinan di perdesaan terindikasi dari kurang berdayanya masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, rendahnya kemampuan untuk mengakses modal usaha, dan masih rendahnya tingkat produktivitas usaha yang dilakukan. Ketidakberdayaan masyarakat miskin tidak saja ditunjukkan oleh indikasi itu, namun bisa juga terindikasi dari kurang berperannya modal sosial dan rendahnya peran kelembagaan. Zuhriah (2012), menyatakan bahwa rendahnya dukungan kelembagaan terhadap sektor usaha kecil dan industri rumah tangga tercermin dari keseriusan dukungan yang diberikan berbagai pihak untuk secara bersama-sama mengembangkan sektor usaha kecil sebagai sektor

usaha riil yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Keseriusan ini diyakini mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan mampu mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi yang terus menggelayuti masyarakat selama ini, yakni kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut dimunculkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap tingkat keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali? 2) Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap peran lembaga adat untuk keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali? 3) Bagaimana pengaruh lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, dan keuangan terhadap keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) pengaruh modal sosial terhadap tingkat keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali; 2) pengaruh modal sosial terhadap peran lembaga adat untuk keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali; dan 3) pengaruh lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, dan keuangan terhadap keberdayaan industri kerajinan rumah tangga di Provinsi Bali.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang teori kelembagaan khususnya tentang modal sosial, maupun peran lembaga tradisional atau lembaga sosial kemasyarakatan (lembaga adat) terhadap keberdayaan dari industri kerajinan rumah tangga khususnya di Provinsi Bali. Modal sosial yang kuat dapat mencerminkan tingkat kepercayaan suatu kelompok apabila melakukan suatu transaksi dengan kelompok lain. Modal sosial yang kuat dapat dijadikan sebagai suatu dasar kepercayaan untuk melakukan suatu transaksi yang berkelanjutan. Modal sosial yang kuat dan realisasi dari peran lembaga adat dapat meningkatkan proses pembangunan suatu daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep kelembagaan

Kelahiran ekonomi kelembagaan ditujukan untuk mengoreksi mazhab neoklasik yang selalu mengesampingkan masalah kelembagaan dalam analisisnya. Institusi mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan, namun pengertian dari institusi itu sendiri sebenarnya masih belum jelas. Menurut Yustika (2008), pendefinisian dapat dipandang sebagai

suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, maka kelembagaan merujuk pada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan transaksi. Jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya.

Kelembagaan didefinisi secara umum sebagai suatu perangkat formal (hukum, kontrak, sistem politik, organisasi, pasar) dan informal (norma, tradisi, kebiasaan, sistem nilai, agama, kecenderungan sosiologis), serta kaidah-kaidah tata-krama yang memfasilitasi koordinasi atau pengaturan relasi antar individu atau kelompok. Lembaga-lembaga yang dimaksud lebih memberi kepastian di dalam interaksi manusia, dan berpengaruh pada perilaku serta keluaran-keluaran seperti kinerja ekonomi, efisiensi, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi (Kherallah & Kirsten, 2001: 3-4) (dalam Mit Witjaksono, 2010: 268).

Berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis), North (1990) (dalam Aceng 2012), membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi, dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Sementara itu, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal, termasuk ke dalam kelembagaan formal.

North dan Schmid (1972) (dalam Aceng 2012) mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun kelompok. Mayoritas dari studi kualitatif dan kuantitatif terkait dengan peranan kelembagaan/institusi dalam proses pembangunan menemukan sebuah korelasi positif kuat antara kualitas dengan kinerja institusi pada satu sisi dan hasil pembangunan pada sisi yang lain.

Konsep Budaya dan Fenomena Ekonomi

Budaya adalah sebuah konsep dinamis yang dipahami oleh hampir semua orang pada beberapa tingkatan. Seluruh peneliti dan penulis setuju bahwa budaya harus ada sebagai fungsi dari alat-alat kognitif. Ini menunjukkan bahwa ada elemen-elemen budaya ideal, yang menunjukkan nilai, sikap, kepercayaan atau kadang-kadang merupakan suatu norma (Hale 2000, Zohar 1980) (dalam Brooks, 2008). Budaya memiliki banyak makna, namun secara sederhana dapat dikatakan sebagai pandangan hidup masyarakat, atau sebagai sistem simbol dan nilai

yang berlaku di masyarakat. Meskipun budaya merupakan bagian dari institusi, para ekonom kelembagaan sering mengesampingkan persoalan budaya, termasuk *new institutional economics*, sekalipun. Memang bagi ekonom pada umumnya, apapun alirannya, sangat tidak tertarik untuk membahas peranan budaya dalam ekonomi. Mereka mengasumsikan budaya sebagai variabel yang konstan. Dalam realitas, banyak kebijakan yang gagal diwujudkan karena diadopsi dari tempat lain yang berbeda budayanya (Ismail, 2003).

Budaya yang menghargai tinggi “bekerja” dan menghargai rendah “menganggur”, selalu menghasilkan semangat kerja yang sangat tinggi, sehingga orang itu memiliki keunggulan lebih dibandingkan orang lain. Orang juga bisa memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Jujur serta menghargai tinggi “bekerja” bukan aspek ekonomi, tetapi persoalan yang terkait dengan pandangan hidup. Jadi, pandangan hidup yang dimiliki seseorang melahirkan nilai ekonomi yang bisa digunakan sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi (Leksono, 2009). “Bekerja” bila dikaitkan dengan suatu keyakinan dari agama yang dianut masyarakat dapat mencerminkan suatu korban suci yang tulus ikhlas, wajib dilakukan tanpa memperhitungkan pamerih atau hasil yang akan diperoleh. Bila bekerja didasarkan pada ketulusan hati bagi mereka yang malakukan, maka dapat meningkatkan kepuasan batin dari pelakunya karena dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Perilaku masyarakat seperti ini dapat meningkatkan semangat untuk bekerja yang pada akhirnya akan mendapatkan nilai ekonomi lebih tinggi (Yuliarmi, 2011). Walaupun bekerja dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan tanpa pamerih, pada akhirnya kegiatan bekerja itu pasti akan mendapatkan hasil. Konsep bekerja seperti ini dapat melahirkan budaya kerja yang menjunjung tinggi norma, kejujuran, kerajinan, dan keikhlasan.

Budaya lokal dianggap sebagai penghambat besar pertumbuhan ekonomi karena nilainya bertentangan dengan rasionalitas ekonomi kapitalis. Namun demikian, dari sisi yang lain, budaya dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi ekonomi. Kasus ini terjadi pada lembaga keuangan tradisional di Bali. Penelitian Wibisana dkk sebagaimana yang dijelaskan Ismail (2003), membuktikan dengan tegas bahwa ada perbedaan kinerja keuangan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) modern dengan BPR tradisional. Dilihat dari indikator manapun, LPD (BPR tradisional) memiliki kinerja keuangan yang jauh lebih baik dari pada BPR modern. Walaupun hal ini merupakan suatu fenomena yang berlaku tidak umum, namun temuan penelitian itu merupakan hasil yang sangat mengagetkan.

Konsep Organisasi Sosial Masyarakat

Organisasi sosial masyarakat pada umumnya mengacu kepada masyarakat geografis lokal, umumnya tetangga.

Seperti didefinisikan oleh Sampson (1999)(dalam Voydanoff, 2001), bahwa organisasi sosial masyarakat mengacu kepada ‘kemampuan struktur masyarakat untuk merealisasikan nilai umum dari penduduknya dan mempertahankan kontrol sosial yang efektif’. Ini membutuhkan aplikasi kumpulan sumber daya masyarakat untuk merealisasikan keunggulan kolektif melalui aktivitas *interlocking* dari sekumpulan jaringan formal dan informal, institusi, dan organisasi secara lokal. Konseptualisasi dan penggunaan organisasi sosial masyarakat dapat dibandingkan dengan organisasi sosial dalam keluarga dan pekerjaan. Organisasi sosial mengacu kepada pola dan fungsi interaksi di antara individual dan kelompok serta hubungan struktural di antara individual dan kelompok dalam posisi berbeda.

Peran Lembaga Keuangan Mikro

Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sampai saat ini dirasakan sangat bermanfaat dalam upaya pertahanan diri khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam upaya untuk menyediakan sumber daya finansial disaat perbankan komersial tidak mampu menjangkaunya. Lembaga keuangan mikro dirasakan sudah lama berperan sebagai sarana yang efektif dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan memberdayakan rakyat kecil (Syahyuti, 2002).

Nilai-nilai keanggotaan LKM memberikan manfaat bagi para anggotanya dalam menjalani suatu kehidupan yang memungkinkan terciptanya kerjasama. Keberhasilan LKM tentunya tidak terlepas dari konsep pemberdayaan kelompok, melalui suatu sistem kelembagaan yang efektif, sehingga terjalin suatu nilai solidaritas yang tinggi dari tiap unsur yang terlibat dalam kelembagaan tersebut. Solidaritas kelompok terbukti berhasil membangun ikatan kerjasama usaha yang memberikan nilai tambah bagi semua anggotanya. Di tempat-tempat kehidupan masyarakat miskin saling terkait satu sama lain, disinilah akan terbangun sinergi modal sosial (Slamet Subandi, 2007).

Konsep Modal Sosial

Coleman (1988), mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Modal sosial merupakan entitas majemuk yang mencakup beberapa aspek dari struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut. Dari perspektif ini, sama halnya dengan modal lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yaitu membuat pencapaian tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis. Sama seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, tetapi spesifik pada aktivitas tertentu. Modal sosial terdiri dari beragam kewajiban, harapan, norma, dan kepercayaan yang terdapat dalam hubungan antara anggota masyarakat. Kalau modal fisik dapat dianggap

sebagai peralatan dan pelatihan yang bisa meningkatkan produktivitas perorangan, modal sosial merupakan suatu kelembagaan masyarakat seperti jaringan kerja, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi kepentingan bersama.

Modal sosial adalah informasi, kepercayaan, dan norma dari timbal balik yang melekat dalam jaringan sosial (Woolcock, 1998) (dalam Voydanoff, 2001). Modal sosial mengacu kepada ciri-ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama saling menguntungkan. Modal sosial juga menambahkan elemen-elemen subyektif, yakni proses budaya seperti kepercayaan dan norma dari timbal balik yang memfasilitasi aksi sosial.

Keberadaan modal sosial tidak saja berkontribusi dan terbangun pada suatu kelompok sosial kemasyarakatan secara tradisional dari suatu lingkungan masyarakat pedesaan, juga dapat berperan pada suatu industri modern. Seperti penelitian Mit Witjaksono (2010), dengan menggunakan proksi MBCA (*Mutually Beneficial Collective Action*), keberadaan dan peran modal sosial semakin produktif dalam fase SILOW (Sentra Industri Logam Waru) Sinergi I dan II. Dengan demikian, secara umum keberadaan dan peran modal sosial dalam konteks dinamika perkembangan SILOW selama ini sudah memberi sumbangan signifikan, baik dalam perspektif komunitas SILOW, perspektif masing-masing perusahaan pelopor, maupun perspektif ASPLOW (Asosiasi Pengusaha Industri Logam Waru).

Solidaritas kelompok dan modal sosial merupakan modal awal untuk membangun kelompok miskin. Solidaritas dan modal sosial dapat dibentuk dari perasaan senasib, yang dapat dibangkitkan dengan pembentukan kelompok anggota yang mempunyai kesamaan kemampuan usaha, latar belakang pendidikan, dan tempat tinggal. Solidaritas kelompok karena adanya saling dukung, simpul mereka, membebaskan para peminjam dari hubungan ketergantungan dan tekanan kelompok itu sendiri yang kemudian menjadi dasar untuk membangun jaringan kerja yang lebih luas (Slamet Subandi, 2007).

Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan

masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah gejala kegagalan dan harapan. Dengan demikian, “pemberdayaan masyarakat”, pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi, namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992)(dalam Cristiawan dan Hidup, 2010).

Konsep Kemiskinan

BPS menggunakan ukuran kemiskinan dengan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dalam pendekatan ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Hal ini sesuai dengan indikator kemiskinan absolut yang dijelaskan sebelumnya.

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator, maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Dalam hal ini, dibandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Todaro (2003), variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terkait dengan perbedaan (1) geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) peranan sektor swasta dan negara, (5) struktur industri, (6) derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) pembagian kekuasaan, struktur politik dan ke lembaga dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada industri kerajinan rumah tangga keluarga miskin yang tergolong Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) di Provinsi Bali. Terpilihnya industri kerajinan sebagai objek penelitian karena industri kerajinan rumah

tangga ini mampu menyerap tenaga kerja relatif besar. Di samping itu, hasil produksi kerajinan rumah tangga ini merupakan produk yang digunakan untuk kepentingan adat, budaya, agama, dan juga digunakan sebagai penunjang pariwisata yang sebagian besar berorientasi ekspor.

Lokasi penelitian adalah di 5 kabupaten dengan jumlah KS 1 yang paling banyak (BKKBN, 2012). Berdasarkan pada pertimbangan tertentu maka dipilih 5 kabupaten yang memiliki unit kerajinan rumah tangga yang paling banyak, yaitu Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, Tabanan, dan Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah KS 1 yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk menentukan kabupaten yang terpilih digunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan pada jumlah KS 1 terbanyak dari masing-masing kabupaten. Proporsi sampel di masing-masing kecamatan kabupaten terpilih, adalah sama. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin (Simamora dalam Husain, 2008). Berdasarkan data tahun 2012 jumlah KS I adalah 100.074 orang, maka jumlah unit sampel adalah 100. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dari pengrajin KS 1 yang diwawancarai adalah *accidental sampling*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa metode (Jogiyanto, 2004) yaitu: wawancara baik terstruktur maupun secara mendalam. Wawancara terstruktur digunakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), digunakan untuk memperoleh data primer dari wakil beberapa responden pengrajin yang menjadi unit sampel. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, dan analisis *Structural Equation Modeling*, dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) (Ghozali, 2008 dan Hair, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pengrajin Terhadap Peran Lembaga Adat

Persepsi pengrajin terhadap peran lembaga adat didekati dengan tiga indikator, yakni peran sosial, budaya, dan keuangan. Setiap indikator tersebut diturunkan ke dalam beberapa butir pernyataan untuk melihat persepsi pengrajin terhadap pernyataan yang diajukan. Pengrajin mempersepsikan pernyataan yang diajukan dengan memilih salah satu pernyataan, dari skor sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju (1–5). Untuk memudahkan memaknai nilai skor yang dipilih oleh pengrajin, maka skor dikelompokkan menjadi dua yaitu sangat tidak setuju sampai tidak setuju (skor < 3) kelompok 1, dan skor cukup setuju sampai sangat setuju (skor \geq 3) kelompok 2. Distribusi frekuensi skor

indikator variabel laten peran lembaga adat ditunjukkan pada Tabel 1.

Persepsi pengrajin terhadap peran sosial lembaga adat terkait dengan aktivitas usaha yang dilakukan cukup baik, oleh karena sebagian besar pengrajin memberikan jawaban dengan skor \geq 3, yaitu sekitar 83 persen, hanya sekitar 17 persen yang merespon kurang. Pengrajin merasakan peran LPD terkait dengan informasi tersebut sangat kurang. Persepsi pengrajin seperti ini dapat juga disebabkan oleh pengrajin selama berusaha tidak pernah berinteraksi dengan LPD, sehingga pengrajin tidak mengetahui ada tidaknya peran tersebut.

Sebagian besar pengrajin merasakan bahwa lembaga adat berperan dalam upaya untuk mempertahankan dan melestarikan adat dan budaya melalui barang kerajinan yang dihasilkan. Sekitar 93 persen pengrajin mempersepsikan cukup setuju sampai dengan setuju (rerata 3,65), terhadap peran lembaga adat untuk tetap mempertahankan budaya Bali.

Distribusi frekuensi persepsi pengrajin terhadap skor indikator peran keuangan lembaga adat, sebagian besar pengrajin merespon dengan cukup baik, yaitu sekitar 71 persen (rerata 3,07). Hanya sebagian kecil saja, sekitar 29 persen, yang merespon kurang berperan terhadap usaha kerajinan yang dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pengrajin tidak pernah berinteraksi dengan LPD.

Tabel 1. Persepsi Pengrajin terhadap Peran Lembaga Adat

Indikator	Skor		Rerata
	< 3	\geq 3	
Peran social	17%	83%	3,14
Peran budaya	5%	95%	3,65
Peran Keuangan	29%	71%	3,07

Sumber: Data Hasil Pengolahan, 2012

Persepsi Pengrajin Terhadap Modal Sosial

Indikator variabel laten modal sosial dalam penelitian ini ada dua yaitu: norma dan kepercayaan. Masing-masing indikator didekati dengan masing-masing butir pernyataan. Butir pernyataan yang diajukan pada masing-masing indikator diharapkan mencerminkan variabel laten modal sosial yang diukur.

Persepsi pengrajin terhadap pernyataan yang diajukan dalam hal ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok 1 dengan skor < 3 dan kelompok 2 dengan skor \geq 3. Distribusi frekuensi pengrajin terhadap norma, sebagai indikator variabel laten modal sosial didekati dengan empat butir pernyataan. Setelah dihitung ternyata seluruh pengrajin (100%) memberikan respon cukup baik sampai dengan sangat baik dengan rerata 4,19 terhadap indikator tersebut. Peran modal sosial dari indikator norma yang dimiliki pengrajin mencerminkan perilaku yang baik. Pengrajin berkeyakinan bahwa kerja keras, kejujuran, perbuatan (karma) yang baik, dan lebih mengutamakan bahwa bekerja adalah proses dibandingkan dengan hasil dapat meningkatkan usaha

kerajinan yang dilakukan.

Skor indikator kepercayaan, diukur dengan menggunakan empat butir pernyataan. Dari keempat butir pernyataan yang diajukan juga direspon baik oleh pengrajin dengan rerata 4,19. Pengrajin percaya bahwa menjunjung tinggi kepercayaan terhadap konsumen akan barang kerajinan yang dihasilkan yaitu menjaga kualitas, ketepatan waktu dalam menyelesaikan barang dan, tidak melanggar kesepakatan akan dapat menjaga kesinambungan dari usaha kerajinan yang dihasilkan. Distribusi frekuensi pengrajin terhadap indikator peran modal sosial ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi Pengrajin terhadap Aspek Modal Sosial

Indikator Variabel Laten Modal Sosial	Skor		Rerata
	< 3	≥ 3	
Norma (X _{1,1})	0%	100%	4,19
Kepercayaan (X _{1,2})	0%	100%	4,19

Sumber: Data Hasil Pengolahan, 2012

Persepsi Pengrajin Terhadap Keberdayaan Industri Kerajinan Rumah Tangga (IKRT)

Berdasarkan Tabel 3, ternyata pengrajin merasa bahwa tingkat penghasilan yang diterimanya relatif rendah, ini ditunjukkan oleh sekitar 40 persen responden menjawab bahwa penghasilan yang diterima sebagai pengrajin adalah kurang. Hanya sekitar 23 persen merasakan bahwa penghasilan yang diterimanya dengan sangat memadai, ditunjukkan oleh nilai skor ≥ 4. Sedangkan untuk indikator lainnya sebagian besar pengrajin merespon cukup baik sampai dengan sangat baik. Sebagian besar pengrajin menyatakan bahwa cukup mendapatkan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan brang kerajinan. Sebagian besar pengrajin menjawab bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari lingkungan desanya yaitu sekitar 72 persen, dan sebagian kecil yaitu sekitar 28 persen menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan diperoleh di kecamatan/kabupaten lainnya.

Tabel 3. Persepsi Pengrajin terhadap Keberdayaan IKRT

Indikator Keberdayaan	Skor			Rerata
	< 3	3	≥ 4	
Cukup untuk mendapat Pang-hasilan (Y _{2,1})	40%	37%	23%	2,84
Cukup memperoleh bahan baku (Y _{2,2})	15%	50%	35%	3,21
Cukup untuk mengembangkan usaha (Y _{2,3})	8%	50%	42%	3,36
Cukup mampu untuk mengontrol usaha (Y _{2,4})	2%	40%	58%	3,62

Sumber: Data Hasil Pengolahan, 2012

Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberdayaan IKRT di Provinsi Bali

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap tingkat keberdayaan industri kerajinan rumah

tangga di Provinsi Bali, dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 4. Modal sosial ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap keberdayaan IKRT. Hasil analisis menunjukkan bahwa, koefisien regresi sebesar 0,1488 mempunyai besaran t hitung 0,9526. Dengan menggunakan *level of significant* (α) sebesar 5 persen, maka t hitung jauh lebih kecil dari t tabel kritis, yaitu 1,96. Walaupun tandanya positif, secara statistic, tidak signifikan, artinya modal sosial tidak signifikan pengaruhnya terhadap keberdayaan IKRT. Modal sosial sangat penting bagi pengrajin, namun untuk dapat berdaya dalam melakukan kegiatan usaha yang dilakukan, masih sangat memerlukan peran unsur lainnya.

Tabel 4. Pengaruh Antar Variabel Laten

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
LA -> Keberdayaan	0.462297	0.118467	0.118467	3.902337
MS -> Keberdayaan	0.148854	0.156256	0.156256	0.952630
MS -> LA	0.450001	0.084954	0.084954	5.296994

Sumber: Data Hasil Pengolahan, 2012

Keterangan: LA = Lembaga Adat, MS = Modal Sosial

Hubungan positif antara modal sosial dengan keberdayaan IKRT, menunjukkan kaitan yang saling mendukung antara persepsi terhadap indikator modal sosial dengan persepsi terhadap keberdayaan IKRT. Semakin tinggi persepsi yang diberikan untuk menilai indikator modal sosial, maka semakin tinggi juga penilaian yang diberikan untuk menilai indikator keberdayaan IKRT. Artinya, semakin tinggi modal sosial pengrajin, semakin tinggi keinginan mereka untuk mandiri. Modal sosial yang mengacu kepada ciri-ciri organisasi sosial yang meliputi norma dan kepercayaan dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama saling menguntungkan.

Tingginya modal sosial yang diaktualisasikan dengan elemen subyektif yang merupakan proses budaya seperti kepercayaan dan norma dapat meningkatkan aksi sosial yang diwujudkan dalam perilaku saling menghargai antar individu maupun kelompok dalam ikatan kegiatan usaha yang ada pada kelompok usahanya. Walaupun ikatan kekeluargaan yang mencerminkan perilaku saling menghargai dan menghormati antara sesama pengrajin telah terjalin dalam hubungan tersebut, ternyata secara langsung belum mampu meningkatkan keberdayaan usaha yang dilakukan, karena diperlukan ikatan sumber daya yang berasal dari pihak lain. Modal sosial dalam suatu masyarakat dapat diperkuat oleh sumber daya tertentu yang berasal dari luar. Modal sosial yang diukur dari indikator norma dan kepercayaan secara otomatis belum mampu meningkatkan keberdayaan IKRT di Provinsi Bali, karena masih sangat memerlukan dukungan sumber daya lain.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Peran Lembaga Adat untuk Keberdayaan IKRT

Menjawab tujuan penelitian kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap peran lembaga adat di Provinsi Bali, ditunjukkan pada Tabel 4. Secara statistik modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran lembaga adat yang ditunjukkan dari koefisien regresi sebesar 0,4500, dan besaran t hitung 5,2970, ($\alpha = 5$ persen), atau ditunjukkan dari t hitung yang lebih besar dari t kritis table (1,96). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran lembaga adat di Provinsi Bali.

Norma sebagai indikator modal sosial mencerminkan perilaku yang baik secara normatif dari masyarakat pengrajin IKRT di lingkungan usaha yang mendukung serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Masyarakat mentaati dan mengikuti aturan adat yang tertuang dalam awig-awig desa adat, dengan berperilaku yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Tidak berani untuk melanggar aturan yang telah disepakati bersama, karena terjadi pelanggaran dapat menimbulkan konflik terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok atau keluarga.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemuka adat pada lingkungan desa adat dalam mengemban tugas adat untuk mengayomi masyarakat agar mempertahankan kegiatan usaha kerajinan yang dilakukan, disamping untuk mempertahankan adat dan budaya juga dilakukan agar masyarakat menghargai hasil karya yang dihasilkan oleh kelompok pengrajin tersebut. Menghargai karya seni adalah ketulusan seseorang yang dapat mencerminkan tingginya modal sosial. Semakin tinggi perilaku yang santun, maka semakin tinggi keinginan berkegiatan sosial untuk mendukung peran lembaga adat. Semakin tinggi modal sosial, maka semakin tinggi keterlibatan pengrajin dalam proses pembangunan, oleh karena semakin tinggi kepercayaan terhadap LPD. Masyarakat pengrajin sangat menyadari bahwa bila diperoleh keuntungan pada LPD yang ada di desa adat tersebut, sebagian akan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan pembangunan, sehingga beban iuran pembangunan yang seharusnya merupakan beban masyarakat akan diringankan.

Terjalannya hubungan antar pengrajin pada lingkungan desa adat mencerminkan dari modal sosial yang terjalin di antara pengrajin yang selanjutnya akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang. Untuk masa depan, semestinya terpelihara ikatan yang kuat antar pengrajin maupun dengan pihak lain. Ikatan secara kekeluargaan yang terjalin dengan baik secara berkesinambungan mencerminkan modal sosial yang kuat di antara mereka. Kuatnya modal sosial akan berdampak pada kemampuan mempertahankan adat dan budaya, yang tentu saja secara ekonomi akan menjamin keberlangsungan aktivitas usaha pengrajin.

Kepercayaan yang diberikan oleh pengelola LPD terhadap pengrajin IKRT yang telah melakukan transaksi keuangan secara berulang adalah tingginya modal sosial yang mempengaruhi peran keuangan lembaga adat untuk meningkatkan keberdayaan IKRT. Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang mempunyai hubungan historis sangat dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pengampu adat ini merupakan cerminan tingginya modal sosial yang diyakini mampu mempengaruhi peran lembaga adat untuk meningkatkan keberdayaan usaha yang ditekuni.

Saling percaya diantara para pengrajin, pembeli, pemasok bahan baku, dan pengelola LPD sebagai penyedia layanan pendanaan dari lembaga adat, juga mencerminkan tingginya modal sosial suatu kelompok atau individu. Walaupun tidak ada perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi (hanya berdasarkan pada kepercayaan), perjanjian diyakini tidak akan diingkari oleh masing-masing pihak, karena kepercayaan terhadap hukum karma. Ini dapat juga mencerminkan tingginya modal sosial dalam masyarakat.

Pengaruh Peran Lembaga Adat terhadap Keberdayaan IKRT

Menjawab tujuan penelitian nomor tiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran lembaga adat terhadap keberdayaan IKRT di Provinsi Bali, hasil pada Tabel 4 juga menunjukkan nilai yang signifikan. Besar nilai koefisien regresi 0,4623 dengan nilai t hitung 3,9023, berada di atas nilai t hitung kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 5 persen. Berarti, peran lembaga adat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberdayaan IKRT di Provinsi Bali.

Peran sosial lembaga adat yang dimaknai sebagai suatu aktivitas sosial dapat menjwai perilaku masyarakat pada umumnya, dan pengrajin pada khususnya, dalam melakukan aktivitas usaha. Apabila mereka dapat bekerja dengan tenang dalam lingkungan desa adat yang menerapkan *awig-awig* yang ketat, maka terjadinya konflik dapat dihindari. Keketatan *awig-awig* tidak dirasakan oleh pengrajin menghambat usaha yang dilakukan. Mereka justru memandang bahwa *awig-awig* memang sewajarnya diterapkan secara konsisten karena dapat menjaga keamanan desa adat.

Memahami *awig-awig* atau aturan adat, sangat kental dirasakan *krama*, karena akan kena sanksi adat bagi yang melanggar. Apabila peraturan yang telah disepakati bersama berjalan dengan baik akan menghindari terjadinya perselisihan, dan hubungan yang kurang baik antar *krama*, sehingga lingkungan menjadi kondusif.

Pengrajin menghasilkan barang kerajinan terkait dengan kegiatan adat, budaya, maupun keagamaan. Dalam suatu bentuk fisik, barang kerajinan yang dihasilkan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya yang dilakukan secara

fisik untuk mempertahankan budaya. Oleh karena barang kerajinan yang dihasilkan berkaitan dengan kegiatan adat dan budaya, maka dengan mempertahankan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang kerajinan tersebut berarti pengrajin telah melakukan aktivitas usaha untuk mempertahankan budaya. Lembaga desa *pakraman*, keberadaannya sangat mendukung dan mengayomi aktivitas *krama* di lingkungan adat, termasuk aktivitas pengrajin dalam menghasilkan barang kerajinan.

Keterlibatan pengrajin untuk menjalin hubungan dengan LPD karena adanya saling keterikatan. Pengrajin memerlukan jasa layanan LPD, merupakan sinergi antara kepedulian lembaga adat terhadap *krama* maupun keterikatan *krama* dengan lembaga adat. Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan milik desa adat ini, sebagian akan kembali ke *krama* dalam bentuk bantuan fisik pembangunan maupun kegiatan keagamaan lain. Tentu saja ini akan meringankan beban *krama* dalam pembangunan maupun aktivitas keagamaan. Oleh karena beban yang ditanggung oleh *krama* tersebut sebagian ditanggung oleh lembaga keuangan milik desa adat.

Konsep pemberdayaan terkait dengan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri, memelihara tatanan nilai budaya pada lingkungan desa adat. Disamping untuk mengembangkan dan menggali potensi usaha kecil dan menengah, juga demi terpeliharanya tatanan nilai budaya pada lingkungan desa adat. Semakin tinggi peran lembaga adat terhadap pelestarian budaya melalui barang hasil kerajinan, semakin tinggi harkat dan martabat, serta semakin percaya diri usaha untuk mempertahankan nilai budaya. Dengan demikian, masyarakat menjadi semakin berdaya. Semakin tinggi peran sosial lembaga adat yang direspon dengan semakin tingginya perilaku sosial masyarakat sebagai pengrajin IKRT akan semakin berdaya menjaga lingkungan adat. Semakin tinggi peran budaya pengrajin, maka semakin tinggi nilai tambah ekonomi dan semakin berdaya pengrajin dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha kerajinannya.

Keterlibatan lembaga adat serta masyarakat desa sebagai *krama* desa adat dalam proses pembangunan, menunjukkan betapa pentingnya harmonisasi antara lingkungan adat dan budaya, karena merupakan aspek kearifan lokal yang harus tetap dipertahankan. Ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Imron *et al.* (2002), bahwa berperannya institusi lokal tradisional akan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal lain, yaitu berupa kedekatan dengan masyarakat tingkat bawah. Kepekaan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat dirasakan, sehingga keberadaannya diyakini sangat menentukan keberhasilan sebuah pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan studi ini, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, modal sosial belum dapat secara langsung memperkuat keberdayaan IKRT di Provinsi Bali. Tingginya modal sosial belum dapat secara langsung mengakibatkan tingginya keberdayaan IKRT. Untuk dapat berdaya, ternyata pengrajin tidak cukup hanya berbekal keyakinan tinggi dari modal sosial, tetapi tetap memerlukan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Tingginya modal sosial pengrajin ternyata harus diperkuat oleh kemampuan secara terus-menerus dalam jangka panjang untuk melakukan interaksi dengan sumber modal lainnya sehingga dapat memperkuat kemandirian usaha kerajinan yang dilakukan. Kedua, modal sosial dapat memperkuat peran peran sosial, budaya, dan keuangan dari lembaga adat untuk meningkatkan keberdayaan IKRT di Provinsi Bali. Kuatnya norma dan kepercayaan, yang merupakan indikator modal sosial, ternyata dapat memperkuat peran lembaga adat. Norma mencerminkan perilaku yang mendukung serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pengrajin dengan setiap orang atau kelompok yang diajak berinteraksi mencerminkan semakin tingginya modal sosial. Kepercayaan yang tinggi yang diberikan kepada pemuka adat dalam mengemban tugas adat mencerminkan tingginya modal sosial. Ketiga, peran lembaga adat yang dilihat dari peran sosial, budaya, dan keuangan dapat meningkatkan keberdayaan IKRT di Provinsi Bali. Semakin berperannya lembaga adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adat dan budaya, akan membawa konsekuensi pada semakin berdayanya pelaku IKRT untuk menghasilkan barang kerajinan. Keberadaan lembaga desa *pakraman* sangat mendukung aktivitas *krama* di lingkungan adat dalam menghasilkan barang kerajinan, karena sebagian besar pengrajin menghasilkan barang kerajinan untuk kepentingan adat, budaya, serta kegiatan keagamaan dan sekaligus sebagai penunjang sektor pariwisata.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah, melalui instansi terkait hendaknya memprioritaskan, memfasilitasi, dan memotivasi kelompok pengrajin yang masih kurang mampu melalui pelatihan serta pendampingan dalam melaksanakan aktivitas usaha. Kedua, hubungan baik antar pengrajin yang telah terjalin selama ini, dapat dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan pembinaan dan informasi secara berkesinambungan tentang fasilitas kredit untuk meningkatkan modal usaha bagi pengrajin yang memerlukan. Ketiga, mempertahankan hubungan

baik dengan pengelola LPD agar diberikan keringanan bunga atau perpanjangan pengembalian kredit apabila menemukan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Hidayat, 2007. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta : Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Bali Dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brooks, Benjamin. 2008. The natural selection of organizational and safety culture within a small to medium sized enterprise (SME). *Journal of Safety Research*, volume 39, pp: 73-85.
- Cahyat, Ade. 2004. "Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia" *Governance Brief, CIFOR*, November (2).
- Christiawan Hendratmoko dan Hidup Marsudi. 2010. Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Di Kabupaten Cilacap. *Dinamika Sosial Ekonomi*, volume 6 Nomor 1, Edisi Mei 2010, pp: 1-17.
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, Vol.94, Supplement: Organizations and Institution: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. 2002. *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002 – 2004. Buku I Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. 2009. *Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (PIKM) Bali*. Laporan Kegiatan Akhir Tahun 2008.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, Badan Penerbit Undip, Edisi 2.Semarang,
- Hair, J. F, William C Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis*, Seventh Edition. New Jersey. Person Prentice Hall.
- Husain, Umar 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Gramedia Pustaka Jakarta.
- Imron M Ali, H.R Riyadi Soeprapto, Suwondo. 2002. *Peranan Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Studi Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*, Publikasi Ilmiah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kekhususan Administrasi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. <http://www.google.com>.
- Ismail, Munawar. 2003. *Emansipasi Nilai Lokal, Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Jogiyanto, H.M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE.
- Khan, Nisar A and Saghira Ahmad Ansari. 2008. *Application of New Institutional Economics to the Problems of Development: A Survey*, *Abstracts Journal of Social and Economic Development*. Vol 10 No. 1, pp. 1-32.
- Leksono, S. 2009. *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional*. Perspektif Emic Kualitatif. Penerbit Percetakan CV Citra Malang.
- Lembaga Adat. 2009. *Desa Adat Kabupaten Gianyar*. Bertenaga by KerSip Open Source. <http://www.google.com>.
- Menard, Claude and Mary M Shirly. 2005. Editor. *Handbook of New Institutional Economics*. Springer the Netherlands.
- Mit Witjaksono. 2010. Modal Sosial Dalam Dinamika Perkembangan Sentra Industri Logam Waru Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 11, No. 2, hlm.266-291.
- Mulya, Eddy IGN. 2008. *Inovasi Layanan LPD Desa Pekraman Denpasar*. <http://www.google.com>.
- Murjana Yasa, IGW. 2009. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT) FE Unud*.
- North, Douglass. C. 1998. *Understanding Institutions*. Editor by Menard Claude. 2000. Edward Eigar Publishing Limited.
- Portes,Alejandro. 1998.Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, *Annu. Rev. Sociol.* 1998. 24:1.24. Department of Sociology, Princeton University, Princeton, New Jersey 08540.
- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Provinsi Bali. 2012. *Profil Pendataan Keluarga Tahun 2011 Provinsi Bali*. Denpasar.
- Setiawan, Hari Harjanto. 2007. Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program SCOR dalam Mencegah Penyebaran HIV/AIDS. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12 (03): 23-32.
- Sippola, Aulikki. 2007. Developing culturally diverse organizations- a participative and empowerment-based method. *Journal of Women in Management Review*, volume 22 No. 4, pp: 253-273.
- Slamet Subandi. 2007. Keberhasilan Dan Prospek Replikasi Konsep Grammen Bank Sebagai Lembaga Kredit Mikro. Disampaikan dalam acara diskusi pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kalangan Peneliti, pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan Instansi terkait pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2007. www.smecda.com/deputi7/file_makalah/01_10_Slamet-LP1.pdf. Diunduh tanggal 10 Desember 2012.
- Syahyuti. 2002. *Berbagai Pola Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Sarasehan Nasional "Micro Finance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan" IPB Bogor.<http://www.google.com>.
- Todaro, Michael P, Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jilid 1 dan 2, Terjemahan Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Voydanoff, Patricia. 2001. Conceptualizing community in the context of work and family. *Community, Work and Family*, volume 4, no. 2.
- Yuliarmi, Ni Nyoman. Peran Pemerintah, Lembaga Adat Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (Studi Pada Industri Kerajinan Di Provinsi Bali). *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori dan Strategi*. Banyumedia Publishing, Malang.
- Zuhriah. 2012. Model Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal - local economic development - di kota Samarinda. *JURNAL EKSIS* Vol.8 No.1, 2001– 2181. <http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>. 15 Desember, 2012.